

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan berada pada urutan yang sangat tinggi dalam agenda desentralisasi, tetapi muatan partisipasi masyarakat dalam RPJM-Desa Landungsari Tahun 2010-2015 ini mengalami perubahan setiap periode pelaksanaannya.
 - a. Pemicu adanya partisipasi masyarakat dalam RPJM-Desa Landungsari adalah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan status sosial masyarakat setempat. Kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat memberikan dampak negatif terhadap pembangunan di desa ini, sikap apatis yang ditunjukkan masyarakat membuat partisipasi semakin melemah.
 - b. Pada perencanaan program RPJM-Desa Landungsari, tingkatan partisipasi masyarakat berada pada tahap informasi, konsultasi dan penentraman, dimana mayoritas kebijakan masih dipegang oleh elit kekuasaan dalam penentuan legitimasi. Dengan demikian masyarakat hanya menerima dan ikut melaksanakan program RPJM-Desa saja.

Sedangkan level partisipasi masyarakatnya berada pada level penghargaan atau *degree of tokenism*.

c. Pada pelaksanaan program RPJM-Desa Landungsari, partisipasi masyarakat yang tertuang dalam sikap gotong-royong dan menjadi ciri khas masyarakat desa semakin lama semakin melemah. Meskipun partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program melemah, tetapi elit kekuasaan yang ada benar-benar mampu menciptakan desa yang dengan taraf pertumbuhan pembangunan yang baik.

2. RPJM-Desa yang secara tekstual memberdayakan masyarakat, agar perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan demokratis, transparansi, akuntabel sesuai Undang-Undang No. 25 tahun 2004. Dalam kontekstualnya belum berjalan cukup baik.

a. Kendala-kendala partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan program RPJM-Desa Landungsari, antara lain: kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintahan (*local organization*), kurangnya keterbukaan ruang publik (*publik space*), akses arus informasi yang kurang jelas, otoritas kebijakan masih dipegang kuat oleh pemerintah desa, dan persepsi dan komitmen pemerintah desa yang belum kondusif dalam memberdayakan masyarakat.

b. Kendala-kendala partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program RPJM Desa Landungsari, antara lain: persepsi dan komitmen masyarakat yang semakin melemah terhadap pembangunan, kurangnya akses informasi pelaksanaan program, sikap gotong royong semakin melemah,

keterbatasan waktu dan biaya, keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan koordinasi yang kurang optimal dari organisasi lokal pemerintah desa dalam pengawasan proyek pembangunan desa.

Dari kendala-kendala partisipasi masyarakat baik dari tahap perencanaan maupun pada pelaksanaan program RPJM-Desa Landungsari Tahun 2010-2015 sulit diterima oleh masyarakat setempat sebagai dokumen pembangunan partisipatif yang bertujuan memberdayakan masyarakat, yang bersumber dari oleh dan untuk rakyat.

B. Saran

Adapun saran yang berkaitan dengan temuan penelitian partisipasi masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah:

1. Pemerintah hendaknya berusaha untuk melibatkan *multry stakeholdes*, dalam pembuatan maupun pelaksanaan program-program kerja yang telah tercipta, tanpa memandang status sosial ekonomi masyarakat.
2. Koordinasi yang lebih baik dari *stakeholdes* pembangunan antara lain: kelompok masyarakat, RT/RW, kepala dusun, tokoh masyarakat, Badan Perwakilan Desa, serta LPMD, sehingga pembagunan yang terjadi bukan hanya sebatas kebijakan *top-down* tetapi juga kebijakan yg bersifat *button-up* dan dapat memberdayakan masyarakat desa
3. Peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat, bawasannya pemerintah desa hanya sebagai fasilitator pembangunan dan membutuhkan peran aktif

masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi kebijakan sehingga masyarakat dapat berperan sebagai subjek dan objek pembangunan.

4. Pemberian wadah partisipasi (*public share*) yang luas, seperti pengaktifan kembali Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbagdus) dan pada pertemuan kegiatan desa lainnya, sehingga aspirasi masyarakat benar-benar tertampung dan dijadikan pertimbangan dalam pembuatan program kerja desa
5. Perlunya peningkatan intensitas informasi dan sosialisasi program oleh pemerintah desa, agar program ini berada pada tingkat kemitraan (*partnership*) dan tingkatan di atasnya, dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kebijakan pembangunan. Selain itu peningkatan intensitas informasi dan sosialisasi program dapat membantu pemerintah desa dalam menangani keterbatasan pembiayaan dana pembangunan desa yang dapat diperoleh dari swadaya dana dari masyarakat
6. Pemerintah desa perlu berinisiatif untuk meningkat kualitas pendidikan *stakeholder* dalam setiap tahap pembangunan, termasuk pemerintah sendiri, karena dengan kualitas yang setara diantara *stakeholder* akan menghindari konflik kepentingan individu maupun golongan.